Jurnal Pengabdian **ILUNG** (Inovasi Lahan Basah Unggul) Vol. 5, No. 2 November 2025, Hal. 104-117
DOI: https://doi.org/10.20527/ilung.v5i2

Fasilitasi Kolaborasi Stakeholder Untuk Penanganan Darurat Sampah Di Kota Banjarmasin

M. Nur Iman Ridwan[1], Tomi Oktaviannor[1], Taufik Arbain[1], Sugiannor[1], Rizal Fahmi[1], Raihan Pangestu Rahman[1]
[1]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Korespondensi: iman.publik-fisip@ulm.ac.id

Diterima: 16 November 2025/ Accepted: 29 November 2025

Abstract
The city of Banjarmasin is currently facing a waste management emergency due to the closure of the Basirih Final Disposal Site (TPAS) in February 2025. This situation was exacerbated by the limited capacity of the Banjarbakula Regional Landfill to accommodate waste from the city, resulting in overflowing garbage at various sites. This community service program aimed to facilitate stakeholder collaboration through a *pentahelix* model (government, academia, community, private sector, and media) to identify problems, build shared understanding, and design a collaborative institutional model for emergency waste management. The main activity was a *Focus Group Discussion* (FGD) involving the Environmental Agency, the Green Community Forum, academics, small entrepreneurs, and media. The results revealed an initial commitment among parties to draft a *Policy Brief* proposing a permanent Pentahelix Collaboration Forum for waste management. The program also produced media coverage, educational videos, and strategic recommendations for local government. This collaborative model demonstrates effectiveness in fostering cross-sector synergy toward resilient and sustainable waste governance.
Keywords: stakeholder collaboration, pentahelix, waste management, facilitation, Banjarmasin
Abstrak
Kota Banjarmasin saat ini masih berada dalam kondisi darurat terkait pengelolaan sampah akibat penutupan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Basirih pada Februari 2025. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan TPA Regional Banjarbakula dalam menampung sampah dari Banjarmasin, yang menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik kota. Program Pengabdian Dosen Wajib Mengabdi (PDWA) ini bertujuan memfasilitasi kolaborasi antar-stakeholder menggunakan pendekatan model *pentahelix* (pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta, dan media) untuk mengidentifikasi masalah, membangun kesepahaman, serta merumuskan model kelembagaan kolaboratif dalam penanganan darurat sampah. Kegiatan utama dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Forum Komunitas Hijau, akademisi, pelaku UMKM, dan media. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya komitmen awal antar pihak dalam penyusunan *Policy Brief* untuk pembentukan Forum Kolaborasi Pentahelix Penanganan Darurat Sampah. Kegiatan

ini juga menghasilkan publikasi media, video edukatif, serta rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah. Model kolaborasi ini terbukti efektif dalam membangun sinergi lintas sektor menuju pengelolaan sampah yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Kata kunci: kolaborasi stakeholder; pentahelix; pengelolaan sampah; fasilitasi; Banjarmasin

1. PENDAHULUAN

Kota Banjarmasin menghadapi kondisi darurat pengelolaan sampah seiring dengan meningkatnya populasi dan aktivitas perkotaan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin tahun 2023, timbulan sampah mencapai sekitar 1.200 ton per hari, namun hanya sekitar 60% yang dapat tertangani secara optimal. Penutupan TPAS Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 1 Februari 2025 menyebabkan krisis penanganan sampah, di mana TPA Regional Banjarbakula hanya mampu menampung sekitar 18% (105 ton/hari) dari total volume harian (Rahman, 2025; Sukarli, 2025).

Dampak dari krisis ini mencakup terganggunya kebersihan lingkungan, peningkatan risiko kesehatan masyarakat, dan ancaman terhadap citra Banjarmasin sebagai kota wisata sungai. Pemerintah telah menetapkan status *tanggap darurat sampah*, namun permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme kolaborasi lintas pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai solusi komprehensif untuk penanganan dari hulu hingga hilir.

Saat ini, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan kebersihan kota. Dengan populasi yang padat dan aktivitas ekonomi yang tinggi, Kota Banjarmasin menghasilkan timbulan sampah (*waste generation*) yang sangat besar, mencapai estimasi 500 - 600 ton per hari.

Kondisi ini diperparah oleh status infrastruktur utama, yakni TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Basirih di Banjarmasin Selatan, yang kini berada dalam kondisi kritis atau *overload*. Lahan seluas ±39,5 hektare tersebut diprediksi memiliki sisa usia pakai yang sangat singkat jika tidak ada intervensi radikal dalam pengurangan sampah dari sumber.

Secara garis besar, metode yang diterapkan oleh Pemko Banjarmasin masih didominasi oleh pendekatan konvensional, yaitu Kumpul - Angkut - Buang (*Linear Economy*). Alur kerjanya adalah sebagai berikut:

a. Pewadahan & Pengumpulan: Di level rumah tangga, sampah dikumpulkan secara tercampur (organik dan anorganik menjadi satu). Pengumpulan dari rumah ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) sangat bergantung pada sektor informal atau jasa swadaya masyarakat yang dikenal dengan sebutan "Paman Gerobak".
b. Pengangkutan: Armada truk DLH mengangkut sampah dari TPS menuju TPA Basirih.
c. Pembuangan Akhir: Sampah ditimbun di TPA Basirih. Meskipun telah berupaya menerapkan sistem *Controlled Landfill*, namun karena volume yang melebihi kapasitas, risiko pencemaran lindi dan gas metana tetap tinggi.

Pemko Banjarmasin sebenarnya telah melakukan berbagai inovasi untuk mengubah paradigma ini, namun hasilnya belum maksimal secara masif. Beberapa program unggulan meliputi:

a. Program "Surung Sintak": Ini adalah metode layanan angkutan sampah tanpa TPS (transfer depo). Sampah dari gerobak pengumpul langsung dipindahkan ke truk konvektor pada jam tertentu di titik yang disepakati. Kendala: Membutuhkan disiplin waktu yang tinggi antara warga/paman gerobak dengan armada truk. Seringkali terjadi ketidaksinkronan jadwal yang menyebabkan sampah tercecer di jalanan.
b. Bank Sampah Induk Baiman: Upaya pengurangan sampah anorganik. Kendala: Partisipasi masyarakat masih fluktuatif dan belum menjadi budaya menyeluruh.
c. Rumah Cacah & Budidaya Maggot: Upaya mereduksi sampah organik. Kendala: Skala pengolahan masih kecil dibandingkan total produksi sampah organik kota yang mendominasi komposisi sampah (mencapai >50%).

Analisis Ketidakefektifan dan Inefisiensi Mengapa kondisi eksisting ini dianggap tidak efektif dan efisien sehingga memerlukan "Fasilitasi Kolaborasi Stakeholder"

a. Beban Biaya Operasional Tinggi (Inefisien): Karena sampah tidak dipilah dari sumber, Pemko harus menanggung biaya pengangkutan untuk semua

jenis sampah, termasuk material yang sebenarnya bernilai ekonomis atau bisa dikomposkan. Mengangkut 600 ton sampah campuran ke TPA jauh lebih mahal daripada mengangkut residu saja.

b. Keterbatasan Armada: Jumlah armada truk dan alat berat di TPA seringkali tidak sebanding dengan volume sampah harian, menyebabkan keterlambatan pengangkutan dan penumpukan di TPS yang mengganggu estetika kota.
c. Masalah Geografis (Kota Sungai): Sebagai "Kota Seribu Sungai", kegagalan pengelolaan sampah di darat berdampak langsung ke perairan. Banyak sampah yang tidak terangkut berakhir di sungai, menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan drainase (masalah banjir).
d. Minimnya Kolaborasi Terintegrasi: Saat ini, beban penanganan sampah bertumpu sangat berat pada pemerintah (DLH). Belum ada ekosistem kolaborasi yang kuat yang membagi peran secara proporsional antara Pemerintah, Sektor Swasta (CSR), Akademisi, dan Komunitas Masyarakat.

Dengan demikian Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki kemauan politik (*political will*) yang baik namun terjebak pada keterbatasan infrastruktur hilir (TPA Penuh) dan lemahnya manajemen hulu (pemilahan masyarakat). Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam pengabdian masyarakat ini berfokus pada kolaborasi stakeholder untuk memecahkan kebuntuan tersebut, bukan sekadar menambah armada angkut

Dalam konteks ini, perguruan tinggi berperan strategis sebagai fasilitator dan jembatan antar aktor melalui program Pengabdian Dosen Wajib Mengabdi (PDWA) yang mengimplementasikan model kolaborasi *pentahelix* dalam merumuskan strategi penanganan darurat sampah berbasis partisipasi dan inovasi sosial.

2. PERMASALAHAN MITRA

Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Banjarmasin dan masyarakat adalah tidak berjalannya sistem pengelolaan sampah secara terintegrasi. Dari hasil observasi dan wawancara dengan mitra, ditemukan beberapa isu kunci:

1. Keterbatasan Kapasitas TPA dan Armada Pengangkut
   TPAS Basirih telah ditutup dan TPA Regional Banjarbakula hanya dapat menampung sebagian kecil sampah harian.
2. Pemilahan Sampah Tidak Berlanjut
   Meskipun sebagian masyarakat telah melakukan pemilahan di rumah, tidak terdapat sistem pengangkutan terpisah, sehingga upaya tersebut tidak berkelanjutan.
3. Minimnya Kolaborasi Stakeholder
   Setiap unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi terpadu.
4. Krisis Komunikasi Publik
   Kurangnya media komunikasi yang efektif menyebabkan kesadaran masyarakat rendah terhadap tanggung jawab pengelolaan sampah.
5. Belum adanya model penanganan sampah yang baik
   Berbagai wilayah menangani sampah menurut versi masing-masing karena belum ada model yang tepat yang bisa dijadikan contoh terbaik.

Kondisi ini menuntut fasilitasi kolaboratif untuk menyatukan kepentingan berbagai pihak, membangun persepsi yang sama, serta merancang langkah bersama menuju pengelolaan sampah berkelanjutan.

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di Kota Banjarmasin pada tanggal 21 Agustus 2025 bertempat di Laboratorium Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan fasilitasi kolaborasi ini dilaksanakan di Laboratorium Program Studi Administrasi Publik FISIP ULM dengan pertimbangan strategis untuk menciptakan iklim diskusi yang objektif dan inklusif. Sebagai institusi akademik, Laboratorium Administrasi Publik menyediakan ruang netral (*neutral ground*) yang bebas dari sekat birokrasi, memungkinkan seluruh stakeholder mulai dari Pemerintah Kota, sektor swasta, hingga komunitas Masyarakat untuk berdialog secara setara. Selain itu, fasilitas laboratorium yang mendukung simulasi kebijakan dan *Focus Group Discussion*

(FGD) sangat relevan untuk membedah permasalahan kompleks seperti penanganan darurat sampah secara mendalam dan berbasis data.

Pendekatan yang digunakan adalah fasilitasi partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan elemen *pentahelix*:

a. Pemerintah (DLH Kota Banjarmasin, Lurah Sungai Andai) : 3
b. Akademisi (Dosen dan Mahasiswa ULM) : 5 orang
c. Komunitas (Forum Komunitas Hijau dan KSM) : 5 orang
d. Swasta (UMKM dan pedagang lokal) : 3 orang
e. Media (Antara News Kalsel) : 1 orang

Tahapan Kegiatan:

a. Analisis situasi: Identifikasi kondisi darurat sampah dan pemetaan stakeholder.
b. FGD (*Focus Group Discussion*): Diskusi kolaboratif untuk merumuskan masalah, solusi, dan rencana aksi bersama.
c. Penyusunan *Policy Brief*: Perumusan rekomendasi pembentukan *Forum Kolaborasi Pentahelix* untuk penanganan darurat sampah.
d. Publikasi dan diseminasi: Penyebaran hasil melalui media daring dan kanal YouTube Prodi Administrasi Publik.
e. Evaluasi dan refleksi: Penilaian efektivitas kolaborasi dan rencana keberlanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan

Dalam pelaksanaan fasilitasi ini, tim pengabdi secara sengaja tidak mendahului kegiatan dengan penyebaran kuesioner pra-FGD. Hal ini didasari oleh pertimbangan metodologis bahwa penanganan sampah di Kota Banjarmasin telah memasuki fase kritis dan darurat, yang memerlukan akselerasi solusi ketimbang pengumpulan data persepsi individual yang memakan waktu. Selain itu, ketiadaan kuesioner bertujuan untuk menjaga orisinalitas pemikiran stakeholder dan menghindari bias informasi (*priming effects*), sehingga proses kolaborasi yang tercipta di Laboratorium Administrasi Publik benar-benar bersifat inklusif, terbuka, dan berfokus pada sinkronisasi peran strategis secara langsung.

FGD yang dilaksanakan berhasil mempertemukan berbagai pihak yang sebelumnya bekerja terpisah. Hasil utama kegiatan meliputi:

a. Teridentifikasinya masalah prioritas: tumpukan sampah di TPS, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kurangnya armada pengangkut.
b. Kesepahaman antar pihak mengenai perlunya forum kolaboratif permanen.
c. Penyusunan *Policy Brief* berisi rekomendasi pembentukan *Forum Kolaborasi Pentahelix Penanganan Darurat Sampah*.
d. Publikasi hasil kegiatan melalui media *Antara Kalsel* dan kanal YouTube Prodi Administrasi Publik ULM.
e. Rencana keberlanjutan berupa pilot project pengelolaan sampah di lingkungan kampus sebagai percontohan.

4.2 Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) "Kolaborasi Stakeholder Penanganan Darurat Sampah" di Laboratorium Administrasi Publik FISIP ULM.

Gambar 2. Peserta FGD dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan swasta.

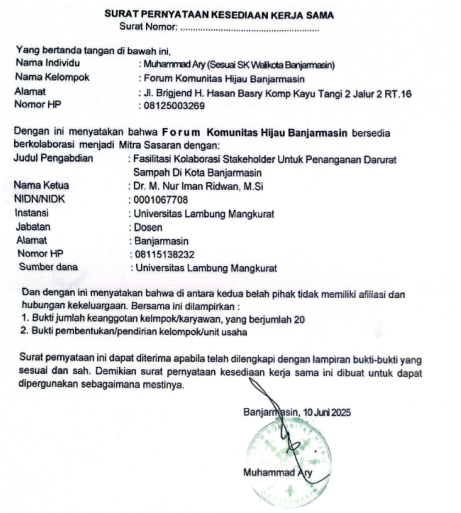

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA
Surat Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama Individu : Muhammad Ary (Sesuai SK Walikota Banjarmasin)
Nama Kelompok : Forum Komunitas Hijau Banjarmasin
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basry Komp Kayu Tangi 2 Jalur 2 RT.16
Nomor HP : 08125003269

Dengan ini menyatakan bahwa **Forum Komunitas Hijau Banjarmasin** bersedia berkolaborasi menjadi Mitra Sasaran dengan:
Judul Pengabdian : Fasilitasi Kolaborasi Stakeholder Untuk Penanganan Darurat Sampah Di Kota Banjarmasin
Nama Ketua : Dr. M. Nur Iman Ridwan, M.Si
NIDN/NIDK : 0001067708
Instansi : Universitas Lambung Mangkurat
Jabatan : Dosen
Alamat : Banjarmasin
Nomor HP : 08115138232
Sumber dana : Universitas Lambung Mangkurat

Dan dengan ini menyatakan bahwa di antara kedua belah pihak tidak memiliki afiliasi dan hubungan kekeluargaan. Bersama ini dilampirkan :
1. Bukti jumlah keanggotan kelmpok/karyawan, yang berjumlah 20
2. Bukti pembentukan/pendirian kelompok/unit usaha

Surat pernyataan ini dapat diterima apabila telah dilengkapi dengan lampiran bukti-bukti yang sesuai dan sah. Demikian surat pernyataan kesediaan kerja sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Juni 2025

Muhammad Ary

Gambar 3. Diskusi dan identifikasi isu darurat sampah bersama Forum Komunitas Hijau.

ANTARAKALSEL

BERITA ULM POLIBAN BANJARMASIN

ULM-Pemkot Banjarmasin gandeng komunitas diskusi tangani sampah

Kamis, 21 Agustus 2025 18:53

Banjarmasin (ANTARA) - Tim Dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Kota Banjarmasin menggandeng

Gambar 4. Publikasi hasil kegiatan pada *Antara News Kalsel* dan kanal YouTube Prodi Administrasi Publik.

4.3 Pembahasan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif berbasis *pentahelix* efektif dalam membangun kesadaran dan komitmen bersama. Setiap aktor memainkan peran sesuai kapasitasnya: pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaksana, swasta sebagai pendukung sumber daya, dan media sebagai penyebar informasi.

Hasil ini sejalan dengan teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008) yang menekankan pentingnya kepercayaan, dialog tatap muka, dan komitmen jangka panjang dalam mengelola isu publik kompleks. Selain itu, proses kolaboratif ini membuka peluang bagi pembentukan kelembagaan baru yang menjembatani koordinasi lintas sektor sebagaimana disarankan Emerson et al. (2012).

1. Komparasi dengan Pendekatan Terdahulu: Dari Teknis ke Kolaboratif

Penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat terdahulu mengenai sampah di Kota Banjarmasin umumnya berfokus pada aspek teknis (seperti efektivitas *Surung Sintak* atau kapasitas TPA Basirih) dan pendekatan top-down.

- Studi Terdahulu: Seringkali menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal yang bertanggung jawab penuh, sementara masyarakat hanya sebagai objek atau sumber masalah. Pendekatan ini terbukti gagal mengatasi status "Darurat Sampah" karena beban kerja yang tidak seimbang.

- Kegiatan Saat Ini: Berbeda dengan pola lama, fasilitasi di Laboratorium Administrasi Publik FISIP ULM mengedepankan paradigma Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008). Fokusnya bukan lagi pada "cara mengangkut sampah", melainkan "siapa melakukan apa dalam ekosistem pengelolaan sampah". Pergeseran dari solusi teknis ke solusi manajerial-kolaboratif inilah yang menjadi pembeda utama.

2. Mengapa Terjadi Peningkatan Pengetahuan Mitra?

Peningkatan pengetahuan Pemerintah Kota (DLH) dan stakeholder terkait dalam kegiatan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui proses Double-Loop Learning:

- Pertukaran Pengetahuan Lintas Sektor: Di dalam laboratorium, terjadi dekonstruksi ego sektoral. Pemerintah memahami kendala operasional

"Paman Gerobak" dan sektor swasta memahami keterbatasan regulasi pemerintah. Pengetahuan baru muncul dari sinkronisasi data antar-aktor yang sebelumnya terfragmentasi.

- Laboratorium sebagai "Policy Lab": Penggunaan setting laboratorium memungkinkan peserta melakukan simulasi kebijakan. Menurut teori *Policy Learning*, lingkungan akademik yang kondusif merangsang pemikiran kritis. Mitra tidak hanya "diberitahu", tetapi "menemukan sendiri" celah inefisiensi dalam sistem *linear economy* yang selama ini mereka jalankan.
- Visualisasi Krisis: Melalui pemaparan data yang difasilitasi tim pengabdian, mitra mendapatkan *sense of urgency* yang lebih tajam. Pengetahuan tentang sisa usia pakai TPA Basirih yang dikaitkan dengan proyeksi timbulan sampah di masa depan mengubah persepsi "rutinitas" menjadi "darurat".

3. Analisis Perubahan: Kondisi Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Dimensi	Sebelum Kegiatan (Kondisi Eksisting)	Sesudah Kegiatan (Dampak Intervensi)
Pola Pikir (Mindset)	Sampah adalah beban biaya dan tanggung jawab DLH semata.	Sampah adalah tanggung jawab kolektif dan potensi ekonomi (Circular Economy).
Komunikasi	Terjadi *silo-mentality* (bekerja sendiri-sendiri) dan minim koordinasi lintas dinas/sektor.	Terbentuknya kanal komunikasi yang setara dan terbuka antar stakeholder.
Strategi Solusi	Berfokus pada hilir (menambah alat berat, memperluas TPA).	Berfokus pada hulu (reduksi dari sumber dan pembagian peran peran swasta/masyarakat).
Identifikasi Masalah	Masalah dianggap hanya pada "kurangnya armada".	Masalah diidentifikasi pada "lemahnya kolaborasi dan partisipasi".

4. Efektivitas Fasilitasi Tanpa Kuesioner Pra-FGD

Dibandingkan dengan pengabdian masyarakat konvensional yang mengandalkan kuesioner, kegiatan ini menunjukkan bahwa dialog deliberatif di laboratorium jauh lebih efektif untuk isu darurat.

"Kuesioner seringkali hanya memotret keluhan, namun fasilitasi kolaboratif melahirkan solusi."

Dengan langsung terjun ke dalam diskusi (FGD), tim pengabdian berhasil memotong hambatan birokrasi dan langsung masuk ke fase Trust Building dan Commitment to the Process. Hal ini selaras dengan temuan Emerson dkk. (2012) bahwa dalam kolaborasi, *principled engagement* (keterlibatan prinsipil) jauh lebih penting daripada sekadar data persepsi awal untuk memulai sebuah aksi perubahan.

5. Sintesis: Menuju Banjarmasin yang Resilien

Peningkatan pengetahuan mitra bermuara pada kesadaran bahwa "Darurat Sampah" di Banjarmasin tidak bisa diselesaikan dengan *Business as Usual*. Inovasi yang dihasilkan dari diskusi di Laboratorium FISIP ULM ini mendorong adanya Peta Jalan Kolaborasi yang lebih konkret, di mana akademisi berperan sebagai pengawal kebijakan, swasta sebagai pendukung melalui CSR yang terintegrasi, dan pemerintah sebagai regulator yang fasilitatif.

5. KESIMPULAN

Program PDWA ini berhasil:

a. Membangun kesepahaman antar-stakeholder dalam menghadapi darurat sampah di Kota Banjarmasin.
b. Menghasilkan rekomendasi pembentukan *Forum Kolaborasi Pentahelix* sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berkelanjutan.
c. Meningkatkan kesadaran publik melalui diseminasi hasil lewat media daring dan kegiatan akademik.

Kolaborasi multi-aktor ini menjadi model efektif untuk mengatasi persoalan lingkungan perkotaan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat bertajuk "Fasilitasi Kolaborasi Stakeholder Untuk Penanganan Darurat Sampah Di Kota Banjarmasin" yang dilaksanakan di Laboratorium Program Studi Administrasi Publik FISIP ULM telah berhasil mencapai tujuan strategisnya. Berdasarkan proses fasilitasi dan dialektika yang terjadi, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan (Knowledge Transformation) Kegiatan ini berhasil mengubah paradigma mitra (Pemerintah Kota Banjarmasin dan stakeholder terkait) dari pendekatan Linear (Kumpul-Angkut-Buang) menuju pendekatan Collaborative & Circular. Mitra kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam bahwa masalah sampah bukan sekadar persoalan teknis penyediaan armada truk, melainkan persoalan manajerial yang melibatkan sinkronisasi kebijakan, data timbulan sampah yang akurat, dan pembagian peran aktor (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang selama ini masih berjalan parsial.
2. Penguatan Kesadaran (Awareness Building) Terjadi peningkatan kesadaran yang signifikan mengenai status "Darurat Sampah" di Kota Banjarmasin. Melalui paparan data dan diskusi kritis di laboratorium, mitra menyadari bahwa ketergantungan penuh pada TPA Basirih yang sudah hampir melampaui kapasitas (overload) adalah bom waktu ekologis. Kesadaran ini bergeser dari "ego sektoral" (menganggap sampah hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup) menjadi "kesadaran kolektif" bahwa kegagalan pengelolaan sampah berdampak sistemik pada citra kota, kesehatan publik, hingga risiko banjir akibat penyumbatan sungai.
3. Peningkatan Motivasi (Motivational Drive) Fasilitasi ini berhasil memicu motivasi mitra untuk segera menginisiasi langkah-langkah konkret di luar rutinitas birokrasi. Muncul komitmen baru untuk menyusun Peta Jalan (Roadmap) Kolaborasi yang melibatkan sektor swasta melalui optimalisasi CSR dan pelibatan aktif komunitas dalam reduksi sampah di hulu. Suasana akademik di Laboratorium FISIP ULM memberikan ruang aman bagi mitra untuk mengeksplorasi solusi inovatif yang sebelumnya sulit tersampaikan dalam rapat-rapat kedinasan yang kaku.
4. Efektivitas Model Fasilitasi Penggunaan Laboratorium Administrasi Publik sebagai neutral ground (ruang netral) terbukti efektif sebagai katalisator perubahan. Ketiadaan kuesioner pra-FGD tidak mengurangi kualitas hasil, justru mempercepat proses pembangunan kepercayaan (trust building) dan kejujuran informasi antar stakeholder. Hal ini membuktikan bahwa dalam kondisi darurat, pendekatan kualitatif-deliberatif jauh lebih efisien untuk menghasilkan konsensus dibandingkan pendekatan administratif-positivistik.

Penutup: Secara keseluruhan, kegiatan ini telah mengubah posisi Pemerintah Kota Banjarmasin dari "pemadam kebakaran" yang hanya berfokus pada pembersihan hilir, menjadi "fasilitator kolaborasi" yang mulai merancang tata kelola sampah yang lebih berkelanjutan dan integratif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki visi serupa dalam memajukan tata kelola lingkungan di Kota Banjarmasin. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat atas kepercayaan, dukungan pendanaan, serta fasilitasi penuh melalui skema Program Dosen Wajib Mengabdi (PDWA) Tahun 2025, yang telah memungkinkan ide-ide akademik ini bertransformasi menjadi aksi nyata di lapangan.

Apresiasi mendalam juga ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin atas keterbukaan, data, dan kerja sama yang solid sebagai mitra utama dalam upaya membedah solusi atas kondisi darurat sampah saat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Banjarmasin yang telah memberikan perspektif kritis dan dedikasi luar biasa dalam menjaga napas kelestarian lingkungan di kota ini.

Dukungan publikasi dan penyebaran semangat kolaborasi ini juga tidak terlepas dari peran strategis Media Antara Kalsel yang telah membantu mengomunikasikan urgensi penanganan sampah kepada masyarakat luas. Terakhir, penghargaan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada seluruh peserta FGD yang telah hadir dan berpartisipasi aktif di Laboratorium Administrasi Publik FISIP ULM. Pikiran, tenaga, dan komitmen yang telah dicurahkan selama sesi diskusi merupakan kontribusi tak ternilai bagi terciptanya rekomendasi kebijakan yang inklusif demi masa depan Kota Banjarmasin yang lebih bersih dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Avitadira, A., & Indrawati, I. (2021). Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan sampah di Kota C. Jurnal Pembangunan Sosial, 16(2), 100–110.

Deseve, E. (2009). Integration and innovation in the intelligence community: The role of a netcentric environment, managed networks, and social networks. Harvard University.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. (2023). Data timbunan sampah Kota Banjarmasin 2023. Pemerintah Kota Banjarmasin.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Haryanto, E., & Aini, Q. (2023). Collaborative governance dan tantangan pengelolaan sampah di era darurat TPA. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(1), 45–58.

Hayati, M. (2022). Tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengelolaan sampah di kawasan sungai Kota Banjarmasin. Journal of Environmental Law, 10(2), 172–177.

Khotimah, S., & Nasruddin, N. (2022). Pencemaran Sungai Martapura akibat perilaku masyarakat membuang sampah. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1(2), 37–41. https://doi.org/10.58705/jpm.v1i2.47

Oktavianawati, D., & Fajarrini, M. S. (2018). Strategi manajemen krisis darurat sampah melalui kolaborasi pentahelix. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, 16(1), 35–48.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Pemerintah Kota Banjarmasin. (2018). Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Rahman, D. (2025, Februari 5). Keterbatasan angkutan sampah ke TPA Regional Banjarbakula. Antara News Kalsel.

Sukarli, A. (2025, Februari 10). Produksi sampah harian Kota Banjarmasin pasca penutupan TPAS Basirih. Banjarmasin Post.